

**ANALISIS KETIMPANGAN EKONOMI PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2008-2017**

*ECONOMIC INEQUALITY ANALYSIS OF CENTRAL JAVA PROVINCE
2008-2017*

¹⁾Fahrizal, ²⁾Sudati Nur Sarfiah, ³⁾Whinarko Juliprijanto
Fakultas Ekonomi, Universitas Tidar
fahrizalkuliah@gmail.com

Abstrak

Pembangunan ekonomi bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Tingginya laju pertumbuhan ekonomi belum tentu mencerminkan naiknya kesejahteraan masyarakat jika tidak diiringi dengan pemerataan hasilnya sehingga berdampak ketimpangan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar ketimpangan ekonomi, sektor-sektor ekonomi unggulan, dan potensi sektor basis ekonomi di Provinsi Jawa Tengah tahun 2008-2017 menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan Indeks Williamson, Tipologi Klasen, Location Quotient sebagai alat ukur. Pengumpulan data menggunakan teknik studi dokumenter yaitu publikasi BPS secara nasional maupun regional. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan dari tahun 2008-2017 ketimpangan ekonomi berdasarkan Indeks Williamson di Provinsi Jawa Tengah trennya menurun meskipun angkanya tinggi. Hasil analisis tipologi Klasen Sektor industri pengolahan, perdagangan, hotel dan restoran, dan sektor pertanian termasuk sektor yang berkontribusi besar terhadap PDRB Provinsi Jawa Tengah serta merupakan sektor maju dan maju tapi tertekan. Ada lima sektor basis dan empat sektor non basis pada hasil analisis LQ Provinsi Jawa Tengah tahun 2008-2017.

Kata Kunci: ketimpangan, tipologi klasen, location quotient, 2008-2017

Abstract

Economic development aims to realize people's welfare. The high rate of economic growth does not necessarily reflect an increase in the welfare of the community if it is not accompanied by equal distribution of results so that it has an economic storage effect. This study aims to find out how much economic inequality, superior economic sectors, and potential economic base sectors in Central Java Province in 2008-2017 using descriptive methods with Williamson Index approach, Klassen Typology, Location Quotient as a measuring instrument. The data used is the population of Central Java Province in 2008-2017, GDP and GRDP as well as the Per Capita GRDP of Central Java Province at Constant Prices. Data collection uses documentary study techniques, namely national and regional BPS publications. This study concludes from 2008-2017 economic inequality based on the Williamson Index in Central Java Province, the trend is declining even though the numbers are high. Results of Classification typology analysis The processing, trade, hotel and restaurant industry sectors and the agricultural sector are among the sectors that have contributed most to the Central Java Province GRDP and are advanced and advanced but

depressed. There are five basic sectors and four non-base sectors based on the analysis of the Tenor Java Province LQ for 2008-2017.

Keywords: inequality, klassen typology, location quotient, 2008-2017

PENDAHULUAN

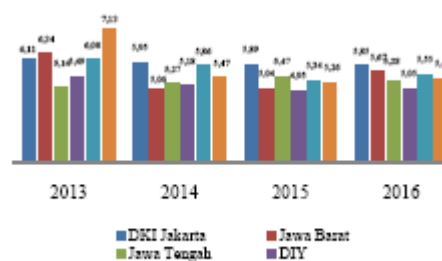
Ketimpangan ekonomi merupakan salah satu permasalahan yang pasti timbul dalam pembangunan, walaupun pada dasarnya ketimpangan ekonomi adalah inherent dengan proses pembangunan itu sendiri (Hasan, Azis, 2018). Ketimpangan ekonomi merupakan fenomena umum yang terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah. Ketimpangan antar daerah dalam output per kapita dan pendapatan di Cina besar dan terus menerus (Chen, 2010).

Ketimpangan ekonomi di suatu daerah akan menimbulkan berbagai permasalahan, seperti peningkatan migrasi dari daerah yang miskin ke daerah yang lebih maju, kriminalitas, dan konflik antar masyarakat. Dalam konteks kenegaraan ketimpangan akan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang kemudian akan mengancam keutuhan suatu negara.

Pulau Jawa yang terdiri dari 6 (enam) Provinsi ini tentu saja memiliki berbagai persoalan-persoalan penting yang harus diselesaikan, diantaranya adalah masalah pertumbuhan ekonomi dan kesenjangan distribusi pembangunan. Aspek pemerataan pembangunan

merupakan hal yang penting untuk dipantau, karena pemerataan hasil pembangunan merupakan salah satu strategi dan tujuan pembangunan nasional di Indonesia (Suyatno, 2013)

Grafik 1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Pulau Tahun 2011-2016 (%)



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2017

Provinsi Jawa Tengah mengalami pertumbuhan ekonomi yang stagnan, tetapi memiliki rata-rata pertumbuhan ekonomi paling rendah ke-dua di antara provinsi-provinsi lain di pulau Jawa. Rendahnya laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah dibandingkan provinsi-provinsi lain di pulau Jawa disebabkan oleh tingginya ketergantungan pada industri pengolahan, kurangnya sumber pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, rendahnya kualitas sumber daya manusia, dan terbatasnya mobilitas tabungan masyarakat (Bappenas, 2018).

Menurut Sjafrizal (2014), faktor-faktor penyebab terjadinya ketimpangan

ekonomi karena adanya perbedaan kandungan sumber daya alam dan perbedaan kondisi demografi yang terdapat pada masing-masing wilayah. Oleh karena itu pada setiap daerah biasanya terdapat wilayah maju (Developed Region) dan wilayah terbelakang (Underdeveloped Region) (Sjafrizal, 2014). Teori ini sejalan dengan yang terjadi di Provinsi Jawa Tengah.

Ike Handayani (2017), Analisis Tipologi dan Sektor Potensial Dalam Pengembangan Ekonomi di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2015 penelitian ini dilakukan di Provinsi Jawa Tengah dengan menggunakan data yang digunakan adalah nilai PDRB, PDRB Perkapita, PDB Nasional, dan jumlah penduduk dengan metode analisis Tipologi Klasen, Location Quotient dan shift share Esteban Marquillas. Hasil analisis Location Quotient (LQ) yang menjadi sektor basis adalah sektor pertanian, sektor industri pengolahan, sektor konstruksi, sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda Motor, Sektor transportasi dan pergudangan, sector jasa pendidikan. Hasil analisis Shift Share Esteban Marquillas pada tahun 2013 - 2015 dapat diketahui hanya beberapa sektor yang mempunyai keunggulan kompetitif dan spesialisasi yaitu sektor industri pengolahan, sektor real estate, dan sektor

jasa pendidikan. Hasil perhitungan analisis Tipologi Klasen perkabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2013-2015, menyatakan kabupaten/kota yang mendominasi pada daerah cepat maju dan tumbuh cepat adalah Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Karanganyar, dan Kota Surakarta karena kabupaten tersebut merupakan pusat perekonomian di provinsi Jawa Tengah, namun pada akhir tahun 2015 beberapa kabupaten yang mengalami penurunan dilihat dari laju pertumbuhan dan pendapatan per kapita semakin berkurang.

Struktur ekonomi Provinsi Jawa Tengah pada 2018 dari sisi produksi masih tetap didominasi oleh Lapangan Usaha Industri Pengolahan dengan kontribusi sebesar 33,90 persen, sedangkan dari sisi pengeluaran didominasi oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PKRT) dengan kontribusi sebesar 59,35 persen (BPS, 2018). Perekonomian di Provinsi Jawa Tengah tergantung dari industri pengolahan karena memberikan kontribusi terbesar.

Berdasarkan data BPS (2018), PDRB Kota Semarang pada 2017 yang diukur atas dasar harga berlaku mencapai Rp.161,25 triliun atau sebesar 13,7% dari total PDRB Jawa Tengah yang mencapai Rp.1.176,5 triliun sementara Cilacap

Rp.105,67 triliun (8,98%). Kudus merupakan kabupaten/kota dengan perekonomian terbesar ketiga di Provinsi Jawa Tengah dengan PRDB mencapai Rp 97,5 triliun (8,29%). Sementara perekonomian Kabupaten Boyolali berada di urutan ke-15 dengan PDRB Rp 28,5 triliun (2,42%). Kota Magelang merupakan wilayah yang memiliki PDRB terendah, yakni hanya mencapai Rp 7,64 triliun atau hanya 0,65% dari total perekonomian Provinsi Jawa Tengah.

Menurut BPS (2018), PDRB Provinsi Jawa Tengah yang diukur atas dasar harga konstan mencapai Rp 894 triliun, tumbuh 5,27% dari tahun sebelumnya Rp 849,31 triliun. Industri pengolahan/manufaktur menjadi penopang terbesar perekonomian Jawa Tengah dengan nilai Rp 308,82 triliun atau 34,54% dari total PDRB. Kemudian diikuti perdagangan besar dan eceran Rp. 129,32 triliun (14,47%) dan pertanian Rp. 118,12 triliun (13,21%).

Ketimpangan ekonomi akan membawa dampak terhadap perbedaan tingkat kesejahteraan di Provinsi Jawa Tengah akhirnya akan menyebabkan ketimpangan ekonomi semakin besar. Perlu adanya kebijakan pemerataan pembangunan ekonomi dengan pengembangan potensi-potensi ekonomi masing-masing daerah di Provinsi Jawa Tengah guna mengurangi

ketimpangan.

KAJIAN PUSTAKA

1. Pembangunan Ekonomi

Pembangunan merupakan bentuk dari suatu proses menuju kemajuan material perekonomian, sehingga ukuran keberhasilannya dapat terlihat dari besaran indikator ekonomi seperti pertumbuhan GDP, pertumbuhan PDRB, proses akumulasi modal untuk investasi, dan tingkat konsumsi masyarakat. Karakteristik tersebut menunjukkan bahwa negara-negara berlomba mencapai kemakmuran ekonomi lewat serangkaian penyelenggaraan pembangunan secara sistematis, dengan tujuan utama memuaskan masyarakat secara material (Tasi, 2013).

Langkah-langkah pembangunan ekonomi sebagai suatu proses multidimensional yang melibatkan perubahan-perubahan dalam struktur sosial, sikap-sikap yang sadar terbiasa dan lembaga- lembaga nasional termasuk percepatan pertumbuhan ekonomi, pengangguran, ketimpangan dan pemberantasan kemiskinan yang absolut (Todaro 2006). Berdasarkan hal tersebut di atas, maka pembangunan ekonomi meliputi tiga

sifat penting, yaitu:

- 1) Suatu proses, yang berarti perubahan yang terjadi secara terus-menerus.
- 2) Usaha untuk meningkatkan pendapatan per kapita dan,
- 3) Kenaikan pendapatan per kapita itu harus berlaku dalam jangka panjang.

Jadi tujuan pembangunan ekonomi disamping untuk menaikkan pendapatan nasional riil juga untuk meningkatkan produktivitas (Irawan, Suparmoko 2002).

2. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu dari indikator keberhasilan suatu proses pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu negara atau wilayah. Meskipun demikian, pertumbuhan ekonomi tidak identik dengan pembangunan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi hanya salah satu syarat dari banyak syarat yang diperlukan dalam proses pembangunan ekonomi (Sukirno 2006). Menurut pandangan kaum historis, diantaranya Friedrich List dan Rostow, Pertumbuhan ekonomi merupakan tahapan proses tumbuhnya perekonomian mulai dari perekonomian bersifat tradisional

yang bergerak di sektor pertanian dimana produksi bersifat subsisten, hingga akhirnya menuju perekonomian modern yang didominasi oleh sektor industri manufaktur (Pratama, 2010).

Pertumbuhan ekonomi tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi. Menurut pandangan ekonom klasik, Adam Smith, David Ricardo, Thomas Robert Malthus dan John Straurt Mill, maupun ekonom neo klasik seperti Robert Solow dan Trevor Swan, mengemukakan bahwa pada dasarnya ada empat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu (1) jumlah penduduk, (2) jumlah stok barang modal, (3) luas tanah dan kekayaan alam, dan (4) tingkat teknologi yang digunakan, sedangkan menurut Schumpeter, faktor utama yang menyebabkan perkembangan ekonomi adalah proses inovasi atau wiraswasta (entrepreneur) (Pratama, 2010).

3. Pembangunan Ekonomi Daerah

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru

dan merangsang perkembangan ekonomi dengan wilayah tersebut. Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses, yaitu proses yang mencakup pembentukan institusi-institusi baru, pembangunan industri-industri alternatif, perbaikan kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar-pasar baru, alih ilmu pengetahuan, dan pengembangan perusahaan-perusahaan baru (Arsyad, 2010).

4. Ketimpangan Regional

Ketimpangan antarwilayah merupakan aspek yang umum terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah. Ketimpangan ini terjadi disebabkan adanya perbedaan kandungan sumber daya alam dan perbedaan kondisi demografi yang terdapat pada masing-masing wilayah. Adanya perbedaan ini menyebabkan kemampuan suatu daerah dalam mendorong proses pembangunan juga menjadi berbeda. Oleh karena itu pada setiap daerah biasanya terdapat wilayah maju (Developed Region) dan wilayah terbelakang (Underdeveloped Region) (Sjafrizal, 2014).

Menurut Kuncoro (2006), kesenjangan mengacu pada standar hidup relatif dari seluruh masyarakat,

sebab kesenjangan antar wilayah yaitu adanya perbedaan faktor anugrah awal (endowment factor). Perbedaan ini yang menyebabkan tingkat pembangunan di berbagai wilayah dan daerah berbeda-beda, sehingga menimbulkan gap atau jurang kesejahteraan di berbagai wilayah tersebut (Sukirno, 2006).

Menurut Hipotesa Neo-Klasik dalam Sjafrizal (2014), pada permulaan proses pembangunan suatu negara, ketimpangan pembangunan antar wilayah cenderung meningkat. Proses ini akan terjadi sampai ketimpangan tersebut mencapai titik puncak. Setelah itu, bila proses pembangunan terus berlanjut maka secara berangsur-angsur ketimpangan pembangunan antar wilayah tersebut akan menurun. Berdasarkan hipotesa ini, bahwa pada negara-negara sedang berkembang umumnya ketimpangan pembangunan antar wilayah cenderung lebih tinggi, sedangkan pada negara maju ketimpangan tersebut akan menjadi lebih rendah. Kurva ketimpangan pembangunan antar wilayah adalah berbentuk huruf “U” terbalik.

Kebenaran Hipotesa Neo-Klasik ini kemudian diuji kebenarannya oleh Williamson pada tahun 1966 melalui

studi tentang ketimpangan pembangunan antar wilayah pada negara maju dan negara sedang berkembang dengan menggunakan data time series dan cross section. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Hipotesa Neo- Klasik yang diformulasi secara teoritis ternyata terbukti benar secara empirik. Ini berarti bahwa proses pembangunan suatu negara tidak otomatis dapat menurunkan ketimpangan pembangunan antar wilayah, tetapi pada tahap permulaan justru terjadi hal yang sebaliknya (Sjafrizal, 2014).

Menurut Simon Kuznet (dalam Todaro, 2006), mengatakan bahwa pada tahap awal pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan cenderung memburuk, namun pada tahap selanjutnya, distribusi pendapatannya akan menaik. Observasi inilah yang kemudian, dikenal sebagai kurva Kuznet “U-Terbalik”, karena perubahan longitudinal (time-series) dalam distribusi pendapatan. Kurva Kuznet dapat dihasilkan oleh proses pertumbuhan berkesinambungan yang berasal dari perluasan sektor modern.



Sumber: Tambunan, 2011

Gambar 2.1 Kurva Hipotesis Kuznets

5. Faktor-Faktor Penyebab Ketimpangan Regional

Beberapa faktor utama yang menyebabkan terjadinya ketimpangan antar wilayah menurut Sjafrizal (2014) yaitu :

- 1) Perbedaan kandungan sumber daya alam

Perbedaan kandungan sumber daya alam akan mempengaruhi kegiatan produksi pada daerah bersangkutan. Daerah dengan kandungan sumber daya alam cukup tinggi akan dapat memproduksi barang-barang tertentu dengan biaya relatif murah dibandingkan dengan daerah lain yang mempunyai kandungan sumber daya alam lebih rendah. Kondisi ini mendorong pertumbuhan ekonomi daerah bersangkutan menjadi lebih cepat. Sedangkan daerah lain yang mempunyai kandungan sumber daya alam lebih kecil hanya akan

dapat memproduksi barang-barang dengan biaya produksi lebih tinggi sehingga daya saingnya menjadi lemah.

- 2) Perbedaan kondisi demografis
Meliputi perbedaan tingkat pertumbuhan dan struktur kependudukan, perbedaan tingkat pendidikan dan kesehatan, perbedaan kondisi ketenagakerjaan dan perbedaan dalam tingkah laku dan kebiasaan serta etos kerja yang dimiliki masyarakat daerah bersangkutan. Kondisi demografis akan berpengaruh terhadap produktivitas kerja masyarakat setempat.
- 3) Kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa

Mobilitas barang dan jasa meliputi kegiatan perdagangan antar daerah dan migrasi baik yang disponsori pemerintah (transmigrasi) atau migrasi spontan. Alasannya adalah apabila mobilitas kurang lancar maka kelebihan produksi suatu daerah tidak dapat di jual ke daerah lain yang membutuhkan. Akibatnya adalah ketimpangan pembangunan antar wilayah akan cenderung tinggi, sehingga daerah terbelakang sulit mendorong proses

pembangunannya.

- 4) Konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah

Pertumbuhan ekonomi akan cenderung lebih cepat pada suatu daerah dimana konsentrasi kegiatan ekonominya cukup besar. Kondisi inilah yang selanjutnya akan mendorong proses pembangunan daerah melalui peningkatan penyediaan lapangan kerja dan tingkat pendapatan masyarakat.

- 5) Alokasi dana pembangunan antar wilayah

Alokasi dana ini bisa berasal dari pemerintah maupun swasta. Pada sistem pemerintahan otonomi maka dana pemerintah akan lebih banyak dialokasikan ke daerah sehingga ketimpangan pembangunan antar wilayah akan cenderung lebih rendah. Untuk investasi swasta lebih banyak ditentukan oleh kekuatan pasar. Dimana keuntungan lokasi yang dimiliki oleh suatu daerah merupakan kekuatan yang berperan banyak dalam menarik investasi swasta. Keuntungan lokasi ditentukan oleh biaya transpor baik bahan baku dan hasil produksi yang harus dikeluarkan pengusaha, perbedaan upah buruh, konsentrasi

pasar, tingkat persaingan usaha dan sewa tanah. Oleh karena itu investasi akan cenderung lebih banyak di daerah perkotaan dibandingkan dengan daerah pedesaan.

Arsyad (2010), mengemukakan 8 faktor yang menyebabkan ketidakmerataan distribusi pendapatan di negara-negara sedang berkembang, yaitu: (a) Pertambahan penduduk yang tinggi yang mengakibatkan menurunnya pendapatan per kapita; (b) Inflasi di mana pendapatan uang bertambah tetapi tidak diikuti secara proporsional dengan pertambahan produksi barang-barang; (c) Ketidakmerataan pembangunan antar daerah; (d) Investasi yang sangat banyak dalam proyek-proyek yang padat modal (capital intensive), sehingga persentase pendapatan modal dari tambahan harta lebih besar dibandingkan dengan persentase pendapatan yang berasal dari kerja, sehingga pengangguran bertambah; (e) Rendahnya mobilitas sosial; (f) Pelaksanaan kebijaksanaan industri substitusi impor yang mengakibatkan kenaikan harga-harga barang hasil industri untuk

melindungi usaha-usaha golongan kapitalis; (g) Memburuknya nilai tukar (term of trade) bagi negara-negara sedang berkembang dalam perdagangan dengan negara-negara maju, sebagai akibat ketidak elastisan permintaan negara-negara terhadap barang ekspor negara-negara sedang berkembang; dan (h) Hancurnya industri-industri kerajinan rakyat seperti pertukangan, industri rumah tangga, dan lain-lain.

6. Potensi Ekonomi Daerah

Potensi ekonomi daerah adalah kemampuan ekonomi yang ada di daerah yang mungkin dan layak dikembangkan sehingga akan terus berkembang menjadi sumber penghidupan rakyat setempat bahkan dapat mendorong perekonomian daerah secara keseluruhan untuk berkembang dengan sendirinya dan berkesinambungan. Potensi ekonomi daerah dapat dikembangkan melalui sektor-sektor unggulan yang dimiliki oleh daerah (Irwan, 2015).

Setiap daerah memiliki potensi daerahnya masing-masing, potensi yang ada di setiap daerah harus dikembangkan oleh pemerintah daerah untuk kesejahteraan masyarakatnya daerah tersebut. Pemerintah daerah

memiliki wewenang penuh untuk memaksimalkan potensi yang ada dan menjadikan sumber pendapatan untuk membangun perekonomian daerah. Setiap daerah tentunya memiliki ciri khas, ciri khas yang positif yang merupakan keunggulan lokal daerah. Potensi ekonomi daerah didenifikasikan oleh Suparmoko (2002) sebagai kemampuan ekonomi yang ada di daerah yang mungkin dan layak dikembangkan sehingga akan terus berkembang menjadi sumber penghidupan rakyat setempat, bahkan dapat mendorong perekonomian daerah secara keseluruhan untuk berkembang dengan sendirinya dan berkesinambungan.

Sumihardjo (2008), menjelaskan bahwa pengembangan sektor unggulan yang dimiliki daerah tercermin pada visi dan misi daerah yang tertuang di dalam rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) dan rencana jangka menengah daerah (RPJMD). Di dalam bidang RPJPD dan RPJMD tampak bidang-bidang prioritas pada setiap program daerah Kabupaten/Kota dalam memperkokoh pengembangan produk unggulan.

7. Teori Basis Ekonomi

Teori basis ekonomi ini menyatakan bahwa faktor penentu

utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah berhubungan langsung dengan permintaan barang dan jasa dari luar daerah Arsyad, (2010). Teori basis ini digolongkan ke dalam dua sektor yaitu sektor basis dan sektor non basis. Dalam hal ini, perekonomian suatu daerah (Y) dibagi atas 2 kelompok sektor utama yaitu sektor basis (B) dan sektor non basis (S). Sektor basis adalah sektor yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah karena mempunyai keuntungan kompetitif (Competitive Advantage) yang cukup tinggi. Sedangkan sektor non basis adalah sektor-sektor lainnya yang kurang potensial tetapi berfungsi sebagai penunjang sektor basis atau dapat dikatakan *service industries* (Sjafrizal, 2014).

Dasar pemikiran teori ini yang intinya adalah karena sektor basis menghasilkan barang dan jasa untuk pasar di daerah maupun di luar daerah yang bersangkutan. Maka penjualan ke luar daerah akan menghasilkan pendapatan bagi daerah tersebut. Peningkatan pendapatan itu tidak hanya akan menaikkan permintaan pada sektor basis, tetapi juga menaikkan permintaan terhadap sektor non basis (Arsyad, 2010).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan maupun menghubungkan dengan variabel lainnya (Sugiyono, 2015).

Berdasarkan teori tersebut, data yang diperoleh dari populasi dan sampel kemudian dianalisis sesuai dengan metode statistik yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar tingkat ketimpangan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah tahun 2008-2019. Data yang dipergunakan adalah data sekunder, yaitu sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literature, buku-buku serta dokumen instansi (Sugiyono, 2015). Data yang dikumpulkan menggunakan teknik studi dokumenter yaitu publikasi BPS secara nasional dan regional yang mencakup seluruh kabupaten/kota di Provinsi di Jawa Tengah dari tahun 2008-2017.

Penelitian ini memakai data sekunder secara berkala (time series) untuk melihat perkembangan objek selama kurun waktu 10 tahun dari tahun 2008-2017 yang diperoleh dari BPS Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah,

Bappenas, Kemenkop Provinsi Jawa Tengah serta instansi yang terkait. Data-data yang dipakai adalah:

- 1) Data kependudukan Provinsi Jawa Tengah tahun 2008-2017.
- 2) PDB Nasional Atas Dasar Harga Konstan seri 2000
- 3) PDRB dan PDRB Per Kapita Provinsi Jawa Tengah Atas Dasar Harga Konstan Seri 2000 tahun 2008-2017.

PEMBAHASAN

1. Ketimpangan Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2017

Tabel 4.1 Hasil Perhitungan Indeks Williamson Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2017

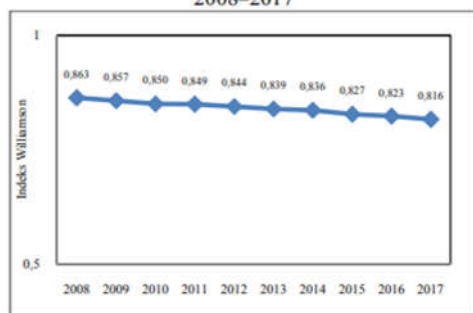
| Tahun | Indeks Williamson |
|-------|-------------------|
| 2008 | 0,863 |
| 2009 | 0,857 |
| 2010 | 0,850 |
| 2011 | 0,849 |
| 2012 | 0,844 |
| 2013 | 0,839 |
| 2014 | 0,836 |
| 2015 | 0,827 |
| 2016 | 0,823 |
| 2017 | 0,816 |

Sumber: hasil analisis, 2018

Dari hasil perhitungan indeks Williamson Provinsi Jawa Tengah tahun 2008-2017 memiliki nilai rata-rata ketimpangan sebesar

0,84 (mendekati 1), maka berdasarkan ketentuan indeks Williamson, pada tahun 2008-2017 ketimpangan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah tinggi.

Grafik 4.1 Perkembangan Indeks Williamson Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2017



Sumber: hasil analisis, 2018

Terkonsentrasinya kegiatan ekonomi di wilayah pantura sebagai pusat kegiatan sektor industri berkontribusi besar terhadap pembentukan PDRB dan terus meningkat, sedangkan wilayah selatan di dominasi oleh sektor pertanian dengan kontribusinya terhadap pembentukan PDRB Provinsi Jawa Tengah terus menurun. Faktor-faktor penyebab tingginya ketimpangan, migrasi penduduk produktif yang memiliki keahlian ke daerah-daerah yang telah berkembang terutama Kota Semarang, investasi berlaku di daerah yang telah berkembang yaitu daerah pantura karena faktor market, lokasi, dan kesempatan

kerja, kebijakan pemerintah yang berbeda-beda.

2. Klasifikasi Sektor Unggulan Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2017

Tabel 4.2 Klasifikasi Tipologi Klassen Pendekatan Sektorial Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2017

| | |
|---|---|
| Sektor maju dan tumbuh pesat $s_i > s$ dan $s_{ki} > s_k$ - Industri Pengolahan - Listrik, Gas dan Air Bersih - Perdagangan, Hotel dan Restoran | Sektor maju tapi tertekan $s_i < s$ dan $s_i > s_k$ - Pertanian - Jasa-jasa |
| Sektor potensial dan $s_i > s$ dan $s_{ki} < s_k$ - Pertambangan dan Penggalian | Sektor relatif tertinggal $s_i < s$ dan $s_{ki} < s_k$ - Bangunan - Pengangkutan dan Komunikasi - Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan |

Sumber: hasil analisis, 2018

1) Sektor maju dan tumbuh pesat

Sektor industri pengolahan tetap menjadi penopang perekonomian Provinsi Jawa Tengah dengan rata-rata kontribusi di atas 30 persen. Suplai listrik di Provinsi Jawa Tengah surplus 30 persen dari total beban listrik saat ini 25.000 megawatt. Jumlah penyalur LPG non subsidi mengalami peningkatan dari 75 menjadi 81 unit penyalur. Di sisi lain jumlah perusahaan penyalur tabung LPG subsidi (3 kg)

mengalami peningkatan setiap tahunnya. Jumlah pelanggan perusahaan air minum di Provinsi Jawa Tengah meningkat sebanyak 1,13 persen dari 1.447.884 sambungan menjadi 1.431.582 sambungan. Sektor hotel dan restoran dinilai paling berperan peningkatan usaha di Provinsi Jawa Tengah karena terjadi peningkatan tiap tahunnya. Jumlah wisatawan mancanegara dan domestik dari tahun ke tahun mengalami peningkatan.

2) Sektor maju tapi tertekan

Sektor pertanian masih menjadi salah satu tumpuan harapan mayoritas penduduk dan salah satu sektor yang berkontribusi besar terhadap PDRB (periode 2008-2017 rata-rata kontribusi sebesar 17,46 persen), tetapi angkanya terus menurun tiap tahunnya. Penyebabnya berkurangnya lahan pertanian seiring dengan meningkatnya laju pertumbuhan penduduk serta perkembangan industri di Provinsi Jawa Tengah, pengelolaan pertanian dikelola secara tradisional, serta jumlah tenaga kerja sektor pertanian yang terus menurun. Perkembangan sektor

jasa stabil dan kontribusinya meningkat pada tahun 2017 menjadi sebesar 11,4 persen, hal ini menunjukkan bahwa sektor jasa terus berkembang tiap tahunnya.

3) Sektor potensial

Belum maksimalnya pengelolaan sektor pertambangan mineral maupun non logam menjadi salah satu penyebab kecilnya kontribusi sektor ini (rata-rata 1,16 persen), sedangkan potensi pertambangan dan penggalan tersebar di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tetapi penerimaan pajak dari sektor ini kecil.

4) Sektor tertinggal

Sektor bangunan, pengangkutan dan komunikasi, keuangan, persewaan dan jasa perusahaan termasuk dalam klasifikasi sektor relatif tertinggal dibandingkan sektor-sektor lainnya. Hal ini dikarenakan rata-rata pertumbuhan dan rata-rata kontribusinya di bawah nasional.

3. Sektor Potensi Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2017

Tabel 4.3 Klasifikasi Location Quotient Sektoral Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2017

| Keterangan | Sektor Ekonomi | Rata-rata LQ |
|------------|--------------------------------------|--------------|
| Basis | Pertanian | 1,37 |
| | Industri Pengolahan | 1,27 |
| | Perdagangan, Hotel & Restoran | 1,24 |
| | Listrik, Gas & Air Bersih | 1,15 |
| | Jasa-jasa | 1,14 |
| | Bangunan | 0,89 |
| | Pengangkutan & Komunikasi | 0,57 |
| Non Basis | Kuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan | 0,39 |
| | Pertambangan & Pengegalian | 0,16 |

Sumber : hasil analisis, 2018

1) Pertanian

Provinsi Jawa Tengah memiliki potensi hasil pertanian yang cukup besar antara lain ditunjang kondisi alam yang subur. Sebagian besar penduduknya menggantungkan hidupnya ke pertanian. Hampir sepertiga tenaga kerja mempunyai pekerjaan utama di kategori pertanian. Hasil produksi sektor pertanian terus meningkat meskipun luas lahan berkurang, hal ini disebabkan karena adanya campur tangan teknologi.

2) Industri pengolahan

Sektor industri pengolahan terutama non migas sangat potensial dalam menciptakan nilai

tambah, mendorong perkembangan sektor-sektor lain (multiplier effect), dan menciptakan lapangan kerja. Sektor industri pengolahan merupakan salah satu dari empat sektor utama pendukung perekonomian Provinsi Jawa Tengah. perkembangan IBS dan IMK sangat membantu perekonomian Jawa Tengah karena terserapnya tenaga kerja dengan jumlah yang besar.

3) Listrik, gas dan air bersih

Jumlah pelanggan listrik di Provinsi Jawa Tengah terus meningkat, baik dari rumah tangga maupun industri. Pada tahun 2008 jumlah pelanggan listrik rumah tangga sebanyak 6.170.648 dan industri 4.395, jumlah total pelanggan tahun 2008 sebesar 5.791 pelanggan. Kemudian tahun 2017, pelanggan rumah tangga 8.910.045 dan industri 9.179, jumlah total 9.603.887 pelanggan. Periode tahun 2014-2017, jumlah penyalur LPG non subsidi mengalami peningkatan dari 75 menjadi 81 unit penyalur. PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. memperluas jaringan gas bumi untuk segala segmen di Provinsi Jawa Tengah guna

meningkatkan daya saing produk dan layanan di mana gas bumi terbukti sebagai energi ramah lingkungan dan bersaing secara harga. Dari sisi produksi air bersih terus mengalami peningkatan.. Kapasitas produksi perusahaan air bersih tahun 2011 sebesar 13 837 titer/detik naik menjadi 18 828 liter/detik tahun 2017. Jumlah air minum yang disalurkan dari 35 PDAM kota/kabupaten di Jawa Tengah tercatat sebesar 310,42 juta meter kubik dan 1,32 juta pelanggan dengan nilai 1,03 trilyun rupiah.

4) Perdagangan, hotel dan restoran

Ekspor Provinsi Jawa Tengah mengalami peningkatan baik dari sisi volume maupun nilai dalam dua tahun terakhir. Berdasarkan jenis komoditasnya, nilai ekspor terbesar disumbangkan oleh komoditas industri kayu, gabus dan jerami yang mencapai 29,80 persen dari total ekspor di Jawa Tengah, sesuai dengan potensi sektor pertanian yang dimiliki Provinsi Jawa Tengah. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mencanangkan 2016 sebagai tahun infrastruktur pariwisata dan terus berlanjut hingga tahun 2017.

Program ini bertujuan menggerakkan perekonomian masyarakat melalui berbagai sektor pariwisata.

5) Jasa-jasa

Pesatnya pembangunan infrastruktur jalan, kesehatan, pemerintahan, maupun pendidikan di Provinsi Jawa Tengah meningkatkan kontribusi sektor jasa-jasa selama tiga tahun terakhir (rata-rata LQ 1,14). Tingginya potensi sektor jasa didorong oleh meningkatnya pertumbuhan dan kontribusi sektor pertanian, industri pengolahan, listrik, gas dan air bersih, perdagangan, hotel dan restoran memiliki keterkaitan yang kuat terhadap sektor jasa. Sektor pertambangan dan penggalian, bangunan, pengangkutan dan komunikasi, keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, keempat sektor ekonomi masuk kategori non basis ($LQ < 1$). Sektor-sektor tersebut tidak memiliki keunggulan komparatif atau non basis pada sektor perekonomian Provinsi Jawa Tengah dan lebih kecil dari sektor yang sama pada perekonomian nasional serta hanya mampu memenuhi kebutuhan daerah di Provinsi Jawa Tengah dan belum

dapat diperdagangkan ke luar daerah (*non tradable*).

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

1) Indeks Wailliamson

Dari hasil perhitungan indeks Williamson Provinsi Jawa Tengah tahun 2008-2017 memiliki nilai rata-rata ketimpangan sebesar 0,84 (mendekati 1) maka ketimpangan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah tinggi.

2) Tipologi Klasen

- Sektor maju dan tumbuh pesat
Tiga sektor yang termasuk dalam kategori sektor maju dan tumbuh dengan pesat yaitu: industri pengolahan, listrik, gas dan air bersih serta perdagangan, hotel dan restoran.
- Sektor maju tapi tertekan
Sektor pertanian dan jasa-jasa termasuk ke dalam klasifikasi sektor maju tapi tertekan.
- Sektor potensial

Belum maksimalnya pengelolaan sektor pertambangan mineral maupun non logam menjadi salah satu penyebab kecilnya kontribusi pertambangan dan penggalan.

- Sektor relatif tertinggal
Sektor bangunan, pengangkutan dan komunikasi, keuangan, persewaan dan jasa perusahaan termasuk dalam klasifikasi sektor relatif tertinggal dibandingkan sektor-sektor lainnya.

3) Location Quotient (LQ)

- Sektor basis
Berdasarkan hasil analisis Location Quotient (LQ) terhadap sembilan sektor perekonomian di Provinsi Jawa Tengah selama periode 2008-2017, lima dari sembilan sektor perekonomian merupakan sektor basis yaitu: pertanian, industri

pengolahan, listrik, gas dan air bersih, perdagangan, hotel dan restoran, serta jasa-jasa ($LQ > 1$).

➤ Sektor non basis

Sektor pertambangan dan penggalan, bangunan, pengangkutan dan komunikasi, keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, keempat sektor ekonomi masuk kategori non basis ($LQ < 1$).

2. Saran

Beberapa kebijakan yang dapat direkomendasikan kepada pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan pembangunan ekonomi dengan lebih memperhatikan aspek pemerataan sebagai berikut:

1. Pembangunan ekonomi terutama wilayah selatan hendaknya menitikberatkan pada peningkatan investasi sektor pertanian seperti teknologi pertanian, kualitas SDM petani, mempermudah akses modal dan membuka lapangan usaha seluas-luasnya

di wilayah selatan. Pemberdayaan usaha kecil, menengah, dan koperasi khususnya dalam hal akses permodalan dan penguasaan teknologi tepat guna pelatihan keterampilan serta penyaluran tenaga kerja serta peningkatan akses pendidikan khususnya pendidikan menengah (umum dan kejuruan) maupun Balai Latihan Kerja dan akses kesehatan.

2. Guna mengurangi ketergantungan pada sektor industri pengolahan sebaiknya delapan sektor lainnya mendapat perhatian lebih, sebab potensi-potensi sektor-sektor lainnya cukup besar terutama sektor pertanian karena sebagian besar masyarakat Provinsi Jawa Tengah bekerja di sektor pertanian serta nilai ekspor produk pertanian terus meningkat tiap tahunnya sedangkan kontribusi terhadap PDRB terus menurun. Optimalisasi sektor pertambangan dan penggalan, bangunan, pengangkutan dan komunikasi, keuangan,

persewaan dan jasa perusahaan harus segera dilakukan mengingat potensi sektor-sektor tersebut cukup besar dan bisa meningkatkan kontribusi terhadap PDRB dan akhirnya dapat mengurangi ketimpangan ekonomi.

3. Keberagaman potensi dan komoditas Jawa Tengah memerlukan sinergi antara dunia usaha, pemerintah, dan para stakeholder lainnya untuk mengembangkan perekonomian Provinsi Jawa Tengah terutama pada sektor yang masuk dalam kategori non basis. Hal ini akan menjamin berkembangnya arus perdagangan dan investasi di Provinsi Jawa Tengah yang dapat memperkuat daya saing daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, Lincolin (2010), *Ekonomi Pembangunan*, STIE YKPN, Yogyakarta.
- Bappenas (2011, 2018), *Seri Analisis Pembangunan Wilayah Provinsi Jawa Tengah 2015*. [simreg.bappenas tahun 2015](http://simreg.bappenas.tahun2015).
- BPS Provinsi Jawa Tengah (2018), *Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka 2008-2018*.
- (2018), *Statistik Air Bersih Provinsi Jawa Tengah 2017*,
- (2018), *Statistik Daerah Provinsi Jawa Tengah 2015-2018*.
- (2018), *Statistik Perhubungan Provinsi Jawa Tengah 2014-2017*.
- (2018), *Potensi Pertanian Jawa Tengah Analisis Pendataan Lengkap Sensus Pertanian 2013*
- Chen (2010), *Exposure to Community Violence and Adolescents' Internalizing Behaviors Among African American and Asian American Adolescents*. Empirical Research, 2010.
- Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah (2018) *Time Series Data UMKM Binaan Provinsi Jawa Tengah Posisi Per : Triwulan IV 2017*.
- Handayani (2017), *Analisis Tipologi dan Sektor Potensial Dalam Pengembangan Ekonomi di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2015*, *Jurnal Skripsi tahun 2017*. Diakses di http://eprints.ums.ac.id/49903/1/PU_BLIKASI.pdf tanggal 23 Desember 2018.
- Irawan, Suparmoko (2002), *Ekonomika Pembangunan*, BPFE, Yogyakarta.
- Irwan, at, al., (2015), *Analisis Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal Untuk Memperkuat Daya Saing Daerah Di Kabupaten Gresik*, *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol 1.
- Pratama (2010), *Analisis Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan Penyaluran Kredit Perbankan (Studi pada*

Bank Umum di Indonesia Periode Tahun 2005 - 2009), Jurnal Bisnis Strategi ,Vol 19, No 2 tahun 2010.

Sjafrizal (2014), Perencanaan Pembangunan Dalam Era Otonomi, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Sukirno, Sadono (2006), Pembangunan Ekonomi: Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan, Kencana, Jakarta.

Sumiharjo (2008), Daya Saing Berbasis Potensi Daerah, Puskomedia, Bandung.

Suyatno (2013), Analisis Disparitas Perekonomian Di Wilayah Jawa (Jawa Barat, Jawa Tengah , Dan Jawa Timur) Periode 1996 – 2011, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, UMS.

Tasi (2013), BAB II, Tinjauan Pustaka,Unila.

Todaro, M.P. (2006), Pembangunan Ekonomi, Erlangga, Jakarta.